

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan Melayu merupakan suatu kebudayaan besar yang pernah berjaya di Nusantara. Jauh sebelum kehadiran kolonisasi bangsa-bangsa Eropa di Nusantara, kebudayaan Melayu telah ada dan hidup di daerah-daerah pesisir (perairan) yang juga merupakan jalur strategis transportasi dan jalur perniagaan internasional yang penting pada masanya.¹ Sehingga hal ini memberi dampak masyarakat Melayu menjadi masyarakat yang terbuka baik secara fisik maupun secara kultural. Lokasi pemukiman masyarakat Melayu yang tidak terisolir tersebut memungkinkan masyarakat Melayu terbiasa berhubungan dengan dunia luar, dengan demikian, sudah sejak dahulu masyarakat Melayu menjadi masyarakat yang senantiasa berhubungan dengan orang asing². Posisi masyarakat Melayu tersebut yang berada pada jalur-jalur perdagangan memberi dua dampak besar dalam kehidupan Melayu. Pertama masyarakat Melayu menjadi masyarakat yang egaliter. Kedua masyarakat Melayu sangat dekat dengan dunia Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah yang datang ke Nusantara sebagai pedagang yang mengemban misi dakwah. Sementara itu pada masa kolonial, penyebutan Melayu sendiri mengidentikkan penyebutan secara umum pada masyarakat pribumi.³

Salah satu ciri dari egaliternya masyarakat Melayu tercermin dari bahasa yang ditampilkan, bahasa Melayu sendiri tidak mengenal istilah tingkatan-tingkatan seperti yang terdapat pada bahasa-bahasa etnik lain di Nusantara seperti pada bahasa Jawa dan Sunda. Bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa yang mudah diterima oleh berbagai suku bangsa di Nusantara dan berfungsi sebagai bahasa perantara dalam hubungan antar suku bangsa di Nusantara. Selain itu, cara berbahasa yang ditampilkan oleh orang Melayu yang lugas dan praktis memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat yang egaliter. Ciri keegaliteran dari masyarakat Melayu akan terlihat ketika berada di pasar. Pasar bagi masyarakat Melayu selain menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual, pasar sendiri juga merupakan suatu institusi yang menjadi ruang bertemunya kalangan bangsawan dengan kaum awam yakni petani dan nelayan Melayu secara lebih bebas tanpa ikatan adat yang ketat.⁴ Kebudayaan Melayu yang terbuka tersebut dan juga memiliki kemampuan mengakomodasi perbedaan sebagai hasil pengalaman sejarah yang telah lama berhubungan dengan kebudayaan asing.⁵ Simbol-simbol kebudayaan Melayu kemudian menjadi suatu simbol yang umum-lokal dan menjadi jembatan penghubung dalam masyarakat yang majemuk

¹ A. Vickers, *Peradaban Pesisir: Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*. (Denpasar: Pustaka Larasan dan Udayana University Press.2009)

² A. Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenadiamedia Grup, 2013)

³ A. Vickers, *Peradaban Pesisir: Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*. (Denpasar: Pustaka Larasan dan Udayana University Press.2009)

⁴ H.S.M. Umar dalam H.S. Ahimsa-Putra (ed), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007)

⁵ P. Suparlan dalam H.S. Ahimsa-Putra (ed), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007)

Kehadiran para pedagang-pedagang dari timur tengah ke daerah-daerah Melayu telah memberi warna tersendiri bagi alam Melayu Interaksi antara Melayu dengan orang-orang dari timur tengah merupakan interaksi yang paling kuat,⁶ sehingga agama Islam dan corak tradisi arab yang dibawa oleh pedagang-pedagang tersebut cukup mudah diterima oleh masyarakat Melayu. Bahkan kini, kita senantiasa mengidentikkan Melayu dengan Islam⁷. Seseorang tidak akan dianggap sebagai orang Melayu ketika dia sendiri bukan beragama Islam. Kehadiran Islam di tengah-tengah Melayu juga telah banyak mempengaruhi kebudayaan Melayu, seperti penyebutan istilah kepemimpinan dan jabatan-jabatan kepemimpinan di dalam masyarakat, misalnya penyebutan raja dengan Sultan, selain itu posisi para ulama sangat penting perananannya dalam kesultanan-kesultanan Melayu. Ketika kita membicarakan Melayu maka di dalamnya kita akan membicarakan Islam, Kesultanan dan Melayu itu sendiri.⁸

Salah satu interaksi antara dunia melayu yang termasuk pada masa-masa awal dengan dunia Arab atau dunia Islam adalah pada masyarakat Melayu Palembang. Interaksi antara masyarakat Melayu Palembang dengan dunia Islam atau jaringan ulama dari timur tengah sudah terjadi dari sekitar abad ke-10 yakni pada masa kerajaan Sriwijaya. Namun demikian, perkembangan Islam yang cukup pesat terjadi menjelang keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Palembang menjadi salah satu kekuatan Islam terjadi sejak berdirinya kesultanan Palembang pada abad ke-17.⁹ Peranan ulama-ulama Arab cukup besar pada kesultanan tersebut terutama dalam hal yang menyangkut dengan kebijakan pendidikan keagamaan. Besarnya pengaruh ulama dalam kerajaan-kerajaan Melayu menyebabkan kehidupan masyarakat Melayu menjadi lebih religius. Seseorang tidak akan dianggap sebagai seorang Melayu ketika dia tidak beragama Islam, begitu pula sebaliknya, seseorang akan dianggap menjadi Melayu ketika dia sudah menjadi muslim. Ketika seseorang dianggap menjadi Melayu asal-usul kemudian bukanlah menjadi hal yang dipertentangkan.

Keterbukaan yang dimiliki oleh masyarakat Melayu baik secara fisik dan kultural tentu memberi pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tradisi Melayu. Pengaruh tersebut tentu memiliki sejumlah keuntungan sekaligus memberikan sejumlah tantangan. Keuntungan yang dimiliki dari keterbukaan itu antara lain terhubungannya masyarakat Melayu dengan dunia luar sekaligus lebih mudah menyerap informasi-informasi baru, serta masyarakat Melayu menjadi semakin dekat dengan modernitas. Selain keuntungan tadi, sejumlah tantangan juga harus dilalui oleh masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Melayu Palembang sebagai dampak keterbukaan yang dimiliki tersebut. Ruang kontestasi menjadi semakin terbuka, tidak hanya sebatas orang Melayu, tetapi juga dengan orang-orang dari luar Melayu bahkan komunitas yang lebih luas. Tantangan-tantangan tersebut tentu

⁶ H.M. Lutfi dalam H.S. Ahimsa-Putra (ed), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007)

⁷ P. Suparlan, 2006. Suparlan (2006) mencontohkan orang Dayak di Sambas yang menikah dan masuk Islam tidak dikatakan sebagai orang Dayak yang masuk Islam, melainkan disebutkan sebagai orang Dayak menjadi Melayu.

⁸ H.S. Ahimsa-Putra, *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007)

⁹ A. Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadiamedia Grup, 2013).

memberikan akibat-akibat langsung kepada keberadaan tradisi Melayu itu sendiri, tantangan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga tantangan:

- (1) Dinamika internal Melayu yang diakibatkan oleh hubungan antar etnis dan mobilitas yang menempatkan Melayu, khususnya masyarakat Melayu Palembang sebagai komunitas/masyarakat yang terbuka.
- (2) Pengaruh Negara yang semakin besar dalam penataan tradisi, dimana proses politik dan politisasi kebudayaan berlangsung secara massif yang secara langsung berimbas pada proses objektifikasi budaya Melayu.
- (3) Proses globalisasi yang selain mengubah orientasi masyarakat kesatu tatanan dunia juga telah memberi pilihan-pilihan baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Melayu khususnya di kota Palembang.

Tekanan-tekanan yang berasal dari dinamika internal Melayu, penetrasi Negara, dan globalisasi budaya telah menjadi tekanan penting untuk direspons yang membutuhkan adaptasi masyarakat Melayu secara luas. Tekanan-tekanan yang muncul dapat melahirkan konflik atau ketegangan di dalam masyarakat yang antara lain dimungkinkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan oleh perbedaan nilai yang mencolok antara nilai-nilai luar dengan nilai-nilai dalam masyarakat Melayu. Ketegangan tersebut paling tidak terjadi dalam hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan kekuasaan yang secara langsung memberi tekanan kebijakan bagi masyarakat. Jika tidak terkelola dengan baik, bukan tidak mungkin tekanan-tekanan tersebut akan terus berakumulasi menjadi ancaman bagi keharmonisan kehidupan sosial masyarakat Melayu khususnya di kota Palembang.

Dinamika internal Melayu tentu melahirkan ruang kontestasi antara sesama orang Melayu atau juga antara orang Melayu dengan kelompok etnis lainnya. Kontestasi memungkinkan lahirnya dan ketimpangan serta ketegangan-ketegangan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Penguasaan sumberdaya yang timpang akibat terbukanya masyarakat Melayu memungkinkan munculnya sentimen-sentimen di dalam masyarakat. Orientasi masyarakat yang berubah, infrastruktur darat semakin kuat sementara jalur perairan kurang mendapat perhatian. Perubahan orientasi ini memberi dampak kepada semakinterpinggirnya masyarakat dan tradisi melayu. Tradisi Melayu merupakan tradisi perairan atau maritim, sementara dukungan ke sana masih tergolong lemah. Pendidikan orang Melayu yang cukup rendah, karena minat lebih besar pada pendidikan keagamaan dibanding dengan pendidikan umum yang formal¹⁰ membuat potensi sumberdaya masyarakat Melayu kalah dengan etnis-etnis pendatang. Sementara itu, jika kita membicarakan Melayu seperti Melayu Palembang dalam konteks Indonesia modern, merupakan suatu hal yang tak mungkin kita lakukan untuk menolak kehadiran masyarakat pendatang dari etnis lain, yang bisa saja para pendatang ini memiliki kemampuan yang lebih baik. Di samping itu, mobilitas juga mendorong proses rekonstruksi identitas yang baru,¹¹ tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam masyarakat Melayu dimana para pendatang tidak serta merta menjadi Melayu, karena mereka senantiasa menegaskan keberadaan kebudayaan asalnya.

¹⁰ H.M. Lutfi dalam H.S. Ahimsa-Putra (ed), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007)

¹¹ I. Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hlm. 44.

Menguatnya peran Negara telah meminggirkan kekuatan-kekuatan kultural dalam masyarakat Melayu. Kehadiran Negara yang demokratis telah mengambil sejumlah hak-hak istimewa dari orang Melayu, peran bangsawan dan ulama melayu melemah seiring digantikan oleh kekuatan formal berupa perangkat birokratis Negara. Bahkan, tak jarang hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat belum mendapat pengakuan Negara, sehingga akses masyarakat Melayu terhadap sumberdaya alam menjadi terbatas. Kemerdekaan Indonesia telah mengubah tatanan dan struktur pemerintahan dalam masyarakat Melayu, sistem monarki kemudian diganti dengan sistem pemerintah republik yang terpusat yang juga sekaligus memangkas peran bangsawan dan ulama Melayu. Sementara itu, demokratisasi dan persaingan di dalam sistem pemerintahan juga tidak menempatkan orang Melayu dan tidak didukungnya aspirasi kemelayuan, struktur pemerintahan yang ada tidak memberikan ruang yang cukup kepada representasi orang Melayu yakni tokoh adat (bangsawan) dan ulama dalam memainkan peran.¹² Otonomi daerah justru tidak memberi jaminan bahwa orang Melayu Palembanglah yang akan menjadi pemimpin di kota Palembang, padahal tentu saja masyarakat secara umum mengharapkan bahwa orang Melayu Palembang yang menjadi pemimpin mereka.

Kemelayuan seorang kandidat sering dimainkan untuk merebut simpatik masyarakat di era desentralisasi dewasa ini, dan tak jarang pula kemelayuan yang ditampilkan tak berlanjut ketika para kepala daerah tersebut terpilih. Pemilihan kepala daerah yang diharapkan memberi dampak pada keberpihakan masyarakat di daerah dalam prosesnya tak jarang pula melahirkan konflik-konflik di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi bisa diawali dengan perbedaan pandangan politik dalam pemilihan hingga euforia dari pendukung calon yang menang sehingga memancing amarah pendukung yang kalah. Atau juga konflik dipicu oleh kecurangan-kecurangan yang berlangsung hingga ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilihan. Di samping itu, dalam ajang pemilihan kepala daerah, elit-elit lokal seringkali mempolitisasi banyak hal mulai dari etnisitas, agama, isu-isu putra daerah dan lain sebagainya, sehingga ajang pemilihan kepala daerah tak jarang berdampak pada masyarakat menjadi terbelah. Berlangsungnya proses demokrasi dan berjalannya sistem desentralisasi seyogyanya memberikan peluang bagi tokoh-tokoh budaya Melayu mengambil peran dalam meneguhkan kembali kemelayuan.

Posisi Kota Palembang sangat penting jika kita membicarakan khasanah kemelayuan, secara historis Palembang dikenal sebagai pusat kerajaan Melayu yang bercorak kerajaan maritim, yang pada masa itu merupakan kerajaan yang sangat kuat yang menguasai sebagian besar wilayah di nusantara, yaitu kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 hingga abad ke-13, Kerajaan Sriwijaya pada masa itu merupakan pusat peradaban penting di asia tenggara. Setelah kerajaan Sriwijaya, pada abad ke-17 hingga abad ke-19 berdiri kerajaan Melayu Islam yakni Kesultanan Palembang. Secara geopolitik kota Palembang memungkinkan sebagai pusat dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan perdagangan dalam skala internasional. Sungai Musi yang besar sehingga dapat dilayari oleh kapal-kapal besar, serta posisi sungai Musi sendiri yang merupakan induk dari sungai-sungai yang mengalir dari berbagai daerah di bagian selatan pedalaman Pulau Sumatera memungkinkan Palembang

¹² M. Rahim A dalam H.S. Ahimsa-Putra (ed), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007)

menjadi terminal penghubung kegiatan ekonomi¹³ baik dari pedalaman Sumatera maupun perdagangan Internasional yang menghubungkan dengan jalur-jalur perdagangan dan ekonomi penting saat itu seperti Selat Malaka yang saat itu sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk.

Kebudayaan Melayu yang hidup di kota Palembang selain terpapar oleh kekuatan-kekuatan luar yang dapat memberikan akibat-akibat tertentu pada eksistensi kebudayaan Melayu, juga memiliki kearifan tertentu di dalam merespons berbagai tekanan dalam suatu kerangka penataan sosial-budaya yang lebih baik. Modal yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Palembang dalam merespons berbagai tekanan-tekanan yang disebutkan di bagian awal cukup besar bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup. Palembang sebagai pewaris sejarah Sriwijaya dan Kesultanan Palembang tentu memiliki pranata-pranata dan nilai-nilai yang sudah mengakar dalam masyarakatnya yang telah sekian abad masih mampu bertahan dan beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Jika kita hubungkan dengan globalisasi, sejak dari berabad-abad silam posisi Palembang merupakan “kota yang global”, yang terhubung dengan berbagai masyarakat di belahan bumi lainnya. Namun tentu saja, tidak serta merta semuanya dapat dianggap mudah, karena setiap zaman memiliki karakteristik tantangannya, tetapi setidaknya masyarakat Melayu di Kota Palembang punya basis-basis sosiokultural yang kuat untuk dapat secara bijak dalam merespons berbagai persoalan-persoalan kehidupan sosial yang harus diselesaikan.

Studi tentang bagaimana potensi kebudayaan beroperasi dalam merespons tantangan kehidupan masyarakat Melayu memiliki arti penting bagi kajian Islam dan Melayu. Paling tidak ada tiga arti penting yang akan diperoleh dari kajian ini:

- (1) Studi ini akan memungkinkan diperolehnya satu peta sustensi dan resitensi budaya atas berbagai tekanan dari luar kebudayaan.
- (2) Kajian ini akan menegaskan konstekstualisasi budaya sebagai jawaban atas kritik yang menempatkan kebudayaan sebagai faktor statis.
- (3) Studi ini akan memberi peluang bagi revitalisasi dan rekayasa budaya dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat Melayu yang dinamis.

Keterpaparan dari ketiga hal tersebut sangat besar artinya dalam melihat perkembangan kebudayaan, mengukur modal kekuatan kultural yang dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai pelaku budaya. Masyarakat Melayu Palembang yang senantiasa akan terus berubah seiring perkembangan perubahan zaman, pertanyaannya kemudian, apakah kebudayaan Melayu senantiasa dapat mengadaptasi secara tepat atau justru kehilangan arah tujuannya? Jika saja kegelisahan pelaku budaya melayu dewasa ini belum menemukan jawabannya, dan para pelaku budaya hanya berserah pada keadaan tanpa melakukan tindakan apapun, maka akan tiba masanya budaya Melayu lekang oleh zaman. Karena hingga masa mendatang masyarakat dan kebudayaan Melayu Palembang harus berkontestasi dengan berbagai pilihan-pilihan yang menawarkan suatu tatanan yang mungkin dianggap lebih sesuai. Jika kini kita masih mampu mendengar, bernostalgia dengan kejayaan Melayu, suatu saat mungkin hal seperti itu menjadi hal yang tak mungkin dapat kita lakukan lagi, atau juga

¹³ Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 1-4

kita akan melihat budaya hanya sekedar seremoni tanpa makna. Hal tersebut akan mungkin terjadi, jika saja pelaku budaya Melayu tidak berbuat apa-apa.

Kuat dan pesatnya tekanan dari luar kebudayaan tentu tidak akan pernah terhenti, bahkan tantangan yang dihadapi oleh budaya-budaya lokal seperti halnya kebudayaan Melayu akan terus bertambah di tengah gempuran arus globalisasi. Suatu studi yang menelaah peta sustensi dan resitensi kebudayaan sangat diharapkan peranaannya dalam memberi gambaran objektif dari kebudayaan itu sendiri. Peta sustensi dan resitensi kebudayaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat mengukur diri agar sejauh mana kebudayaan Melayu dan Islam mampu bertahan dan sebesar apa hambatan yang akan dihadapi, dengan demikian para pelaku budaya Melayu dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan demi kemajuan kebudayaan Melayu dan Islam di Indonesia. Jika kita kembali jauh kebelakang, kebudayaan Melayu sebagai salah satu kebudayaan awal-awal di nusantara yang hingga kini masih mampu berkibar walaupun mengalami masa-masa pasang dan surut. Panjangnya kiprah kebudayaan Melayu tentu memiliki basis-basis sosial dan budaya yang dapat menjadi modal untuk terus dapat mempertahankan sustensinya sebagai kekuatan penting bangsa ini.

Tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa kebudayaan yang kita jalankan hari ini adalah merupakan kebudayaan yang sudah final dan sudah tidak memiliki peluang untuk mengkreasi kebudayaan hari ini. Jika saja kebudayaan itu sudah bersifat final, maka kebudayaan itu akan statis, dan apakah suatu kebudayaan yang statis itu dapat *survive* untuk masa yang sangat lama? Jika kita berpikiran demikian, maka suatu kebudayaan akan cepat menjadi usang karena tidak mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan dan persoalan pelaku budayanya yang kian hari akan semakin kompleks.¹⁴ Studi ini menjadi penting dalam mengkontekstualisasikan budaya sebagai sesuatu yang dinamis, suatu perubahan dalam masyarakat merupakan suatu hal yang berjalan secara alamiah dan tidak perlu untuk menjadikan momok sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Kebudayaan sendiri memang seharusnya memberi ruang-ruang kreativitas bagi pelakunya, tidak perlu takut akan hadirnya nilai-nilai baru, selama nilai-nilai baru yang hadir itu tidak bertentangan nilai-nilai universal kemanusiaan. Begitu juga ketika kita mengaitkannya dengan konteks kemelayuan dan keIslaman, hadirnya nilai-nilai baru dalam masyarakat akan memperkaya budaya Melayu dan Islam itu sendiri, menjadikan masyarakat Melayu menjadi lebih toleran.

Kebutuhan dan persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat tentu berjalan secara dinamis dan seiring waktu akan semakin kompleks, begitu pula dengan kehidupan dunia Melayu. Westernisasi yang kita anggap sebagai bagian dari kemodernan seringkali kita melupakan bahwa kita memiliki basis-basis sosiokultural yang sebenarnya mampu menghadapi sejumlah tantangan dan persoalan yang di masa kini dan mendatang akan kita hadapi. Orientasi terhadap dunia luar khususnya barat ditambah sikap kita yang pragmatis membuat kita tidak percaya diri atas kemampuan yang kita miliki, basis-basis sosiokultural yang seharusnya menjadi kekuatan akhirnya tidak memberi dampak apa-apa. Sehingga akan memiliki arti yang sangat penting jika studi kemelayuan diarahkan pada peluang revitalisasi dan rekayasa budaya, sehingga budaya melayu menemukan kebaruannya. Revitalisasi dan rekayasa budaya bukanlah menghilangkan nilai-nilai substansi atau makna dari kebudayaan

¹⁴ Isjoni, *Orang Melayu di Zaman yang Berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 130.

Melayu itu, namun yang dilakukan adalah meneguhkan kembali budaya Melayu sebagai suatu kekuatan kultural yang mampu menjawab sejumlah tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh para pelaku budayanya.

B. Rumusan Masalah

Masyarakat Melayu Palembang dewasa ini menghadapi banyak tantangan-tantangan dalam kesehariannya. Baik itu tantangan yang menyangkut dengan dinamika internal masyarakat Melayu Palembang yang terbuka tersebut dan juga menguatnya peran Negara serta dominannya pengaruh pasar dalam era globalisasi. Tantangan-tantangan yang di hadapi dalam dinamika internal Melayu Palembang tersebut antara lain konflik etnis. Konflik ini menyangkut hubungan-hubungan antar etnis yang terjadi dan harus diselesaikan di tanah Melayu. Tantangan menyangkut dalam menguatnya peran Negara antara lain ketetapan-ketetapan dan kebijakan yang meniadakan Melayu atau tidak mendukung keberadaan kebudayaan Melayu. Sedangkan tantangan dalam globalisasi adalah masuknya paham-paham baru serta masuknya budaya asing yang berbenturan dengan budaya lokal Melayu.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan besar tersebut masyarakat Melayu Palembang harus meresponsnya secara tepat, sehingga mampu menghadapi persoalan-persoalan yang juga merupakan turunan dari ketiga tantangan tersebut. Belum lagi jika kita hubungkan dengan keberadaan masyarakat Melayu perkotaan yang ada di Kota Palembang, masyarakat melayu perkotaan yang relatif memiliki ikatan lebih longgar, lebih rasional, lebih individual serta memiliki ikatan-ikatan lokalitas baru,¹⁵ tentu memiliki kesulitan tersendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Melihat realitas masyarakat Melayu Palembang tersebut, penelitian ini akan membuat suatu rumusan masalah yakni "Bagaimana masyarakat Melayu Palembang menyelesaikan Persoalan (konflik dan sengketa) yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari?" Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut maka peneliti akan mengemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kebudayaan Melayu memecahkan konflik sosial yang terjadi di Palembang?
2. Bagaimana dinamika sistem sosial budaya masyarakat Palembang dalam perubahan global?
3. Bagaimana kearifan Palembang dalam memecahkan konflik etnis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika masyarakat Melayu Palembang, termasuk di dalamnya berbagai konflik yang berlangsung dalam lintasan sejarah dan berbagai perubahannya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh peta sustensi dan resitensi budaya atas berbagai tekanan dari luar kebudayaan, sebagai jawaban penegasan terhadap kritik yang menempatkan kebudayaan sebagai sesuatu yang statis serta memberi peluang bagi revitalisasi dan rekayasa budaya dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat Melayu yang dinamis.

¹⁵ Ibid, h. 172-174

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan baru dalam studi Islam dan Melayu, secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu rujukan para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan berkenaan dengan kebijakan kebudayaan, kebijakan pendidikan, kebijakan pembangunan masyarakat khususnya yang berkenaan dengan masyarakat Islam dan Melayu maupun dalam konteks masyarakat Palembang.

D. Tinjauan Pustaka

Penanganan konflik ditinjau dari pendekatan sosial budaya dalam konteks Indonesia sangat tepat dilakukan. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki potensi konflik yang cukup besar, seperti halnya konflik antaretnis. Akar konflik itu sendiri sebenarnya bukanlah karena perbedaan-perbedaan antaretnis semata, tetapi lebih jauh lagi konflik juga sering sebagai akibat terdapatnya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat, begitu pula corak sistem sosial, politik dan ekonomi pada tingkatan nasional cukup menentukan karakter konflik antaretnis pada tingkat lokal, Lebih lanjut Irwan Abdullah (2001) menambahkan:

“...bukan hanya basis konflik yang menjadi isu penting dalam hubungan antaretnis, tetapi juga basis-basis akomodasi sosial yang memungkinkan terjadinya pembauran yang secara langsung berguna sebagai model pengelolaan konflik secara lebih luas. Berbagai basis akomodasi kultural yang merupakan sumber dalam mengatasi berbagai konflik...”¹⁶

Pemanfaatan basis-basis akomodasi sosiokultural merupakan salah satu bentuk penanganan konflik yang cukup efektif khususnya dalam pengelolaan konflik dalam antaretnis masyarakat yang majemuk. Karakter masyarakat yang majemuk juga mensyaratkan lahirnya media yang dapat merekatkan entitas-entitas yang majemuk tadi, perbedaan-perbedaan itu sendiri tidak mungkin dapat dihilangkan. Namun usaha yang dapat kita dilakukan adalah menyelaraskannya dalam suatu nilai-nilai bersama,¹⁷ sehingga lewat nilai-nilai bersama tadi diharapkan hadir suatu harmoni pada masyarakat kita yang multikultural. Namun menipisnya kohesi sosial dan mulai melunturnya nilai-nilai kultural di masyarakat memberi dampak semakin rentannya terjadi konflik dalam masyarakat kita.

Sabian Utsman (2007) juga mengulas terkait konflik dan solidaritas dalam masyarakat nelayan tradisional di kawasan Sakates. Kontestasi yang terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan yang datang dari luar daerah telah melahirkan ketimpangan dalam masyarakat nelayan di kawasan tersebut. Dominasi yang dimiliki oleh nelayan dari luar daerah telah memunculkan pertentangan dengan nelayan lokal. Di satu sisi, kesamaan nasib diantara nelayan lokal telah pula melahirkan solidaritas diantara sesama nelayan lokal dalam menghadapi nelayan dari luar daerah tersebut.¹⁸ Namun solidaritas yang ditunjukkan oleh nelayan lokal tersebut tidaklah solidaritas yang utuh, di antara sesama nelayan lokal tersebut

¹⁶ I. Abdullah, “Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan: Pemecahan Konflik Etnis di Indonesia”, *Antropologi Indonesia*, Vo. 25, No. 66, 2001.

¹⁷ I. Abdullah, *Berpihak Pada Manusia, Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru*. (Yogyakarta: TICI Publications dan Pustaka Pelajar, 2010)

¹⁸ S. Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan: Sebuah Penelitian Sosiologis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

juga sebenarnya terdapat kontestasi yang melahirkan konflik internal di antara nelayan lokal tersebut. Tipologi konflik seperti ini cukup menarik jika dihubungkan dengan konflik yang terjadi pada masyarakat Melayu Palembang, jika kita ibaratkan nelayan lokal dan nelayan dari luar daerah sama halnya dengan entitas etnis, maka pada masyarakat juga dapat saja terjadi konflik antara lokal dengan pendatang atau juga konflik antar sesama etnis lokal ataupun pendatang.

Dalam konteks kemelayuan, Ahimsa-Putra (2007) mempertanyakan kemelayuan orang Melayu sendiri, apakah orang Melayu masih memiliki kepribadian melayu itu sendiri. Orang Melayu memiliki beberapa ciri kepribadian yang sebenarnya dapat digunakan sebagai pendekatan sosio kultural dalam mengelola dan menghindari konflik dan pertikaian. Beberapa ciri kepribadian atau kemelayuan orang Melayu dalam berinteraksi sosial antara lain; pertama sikap “merajuk” sikap ini merupakan salah satu cara orang Melayu untuk menghindari konflik dengan cara membatasi kontak dengan individu yang berpotensi memberi ketidaknyamanan. Kedua adalah sifat yang menyampaikan sesuatu dengan cara tidak langsung, yakni dengan bahasa-bahasa kiasan. Ketiga sikap menahan diri, hal ini dilakukan agar mengesankan bahwa orang Melayu adalah orang yang sederhana, tidak ambisius. Dalam hal ini juga orang Melayu diperlihatkan sebagai pemalu dan memiliki sikap penyegan.

Sikap selanjutnya yakni sikap yang keempat adalah orang Melayu dikesankan memiliki sikap yang sentimental, sikap sentimental ini menurut Kadir dalam Ahimsa-Putra (2007) dicerminkan dari lagu-lagu Melayu, sikap sentimental ini juga merupakan kelanjutan dari sikap menahan diri tadi. Sikap yang kelima adalah sikap *introvert*, sehingga orang Melayu tidak lantas menyalahkan orang lain ketika mereka berkonflik dengan orang lain, biasanya ditarik ke dalam dirinya. Dan sikap yang keenam adalah orang Melayu merupakan masyarakat yang torelan dan suka dengan kedamaian. Namun disamping mereka punya sikap yang umumnya memperlihatkan menghindari diri dari pertikaian, masyarakat Melayu juga memiliki konsep “amuk”, yakni ketika sesuatu terjadi melampaui batas kesabaran mereka maka orang Melayu tidak akan berdiam diri membiarkan mereka diremehkan, artinya diamnya masyarakat Melayu tersebut bukan karena mereka tidak berdaya melainkan masyarakat Melayu senantiasa untuk sebisa mungkin untuk menghindari terjadinya konflik.

Begitu pula dengan Isjoni (2012) mengemukakan bahwa, dalam era globalisasi masyarakat Melayu khususnya di Indonesia mengalami kemandegan, jika dilihat lebih jauh lagi hal ini tidak bisa dilepaskan dari kolonialisasi yang berlangsung pada zaman Belanda. Bangsa Melayu sebelum penjajahan merupakan bangsa yang cukup kuat yang memiliki orientasi dalam bidang maritim dan hidup dari perdagangan. Kapitalisme Barat yang dibawa oleh penjajah mengalahkan sistem ekonomi yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Melayu tersebut, sehingga posisi-posisi kesultanan melemah. Penjajah Belanda kemudian memberikan sejumlah stereotipe kepada orang Melayu sebagai simbol dari kemalasan, etos kerja rendah dan tertinggalan.¹⁹ Pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, budaya Melayu oleh para kaum nasionalis dianggap sebagai simbol dari kehidupan aristokrat dan feodal sehingga kenyataan ini melemahkan kembali posisi kemelayuan. Sementara itu, dalam konteks kekinian tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan kebudayaan Melayu semakin

¹⁹ Isjoni, *Orang Melayu di Zaman yang Berubah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 35

kompleks, kemajuan sains, teknologi dan komunikasi telah melunturkan kolektivitas dalam masyarakat. Untuk dapat menumbuhkembangkan kembali kohesi sosial dalam masyarakat Melayu maka akan sangat penting untuk menghidupkan kembali kebesaran masa lampau Melayu ke dalam kehidupan masyarakat Melayu dewasa ini.

E. Kerangka Teoritis

Globalisasi telah mengubah banyak hal dalam dunia Melayu, globalisasi yang telah memberikan pilihan-pilihan baru baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya telah mampu mempengaruhi orientasi masyarakat Melayu,²⁰ globalisasi yang mengacu pada perluasan dan penguatan arus modal, teknologi dan informasi pada tatanan pasar global,²¹ sehingga kebudayaan Melayu bukan lagi sebagai referensi tunggal bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial. Di samping itu, globalisasi telah mendorong longgarnya kolektivitas dan menguatnya orientasi materialistik dalam masyarakat Melayu, sehingga hal ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi masyarakat Melayu. Longgarnya kolektivitas dalam masyarakat tentu memberi pengaruh melemahnya ketaatan-ketaatan pada nilai-nilai tradisi Melayu, yang berarti bahwa setiap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat tidak serta merta mampu diselesaikan lewat penyelesaian kultural. Kuatnya pengaruh pasar juga telah mengubah orientasi masyarakat menjadi lebih materialistik dan mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif. Karena hampir semua aspek kehidupan tak bisa dielakkan dari ketergantungan terhadap pasar. Tatanan global juga mengharuskan orang Melayu untuk berkompetisi dalam semua hal baik menyangkut sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam kompetisi yang lebih luas dan tanpa batas. Jika saja masyarakat Melayu bisa mengambil peran yang lebih baik, globalisasi dapat menjadi peluang bagi budaya Melayu untuk hadir lebih meng-global namun dengan sejumlah konsekuensi akan terjadi sejumlah komodifikasi budaya dan tradisi Melayu.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tiga pendekatan teoritis dalam analisisnya. Adapun pendekatan teoritis yang dimaksud yakni, teori konflik, teori resolusi konflik dan teori reproduksi kebudayaan. Ketiga pendekatan tersebut akan kita perbincangkan satu-persatu dalam bagian ini, untuk yang pertama kita akan membahas teori konflik.

1. Teori Konflik

Di awal-awal sudah cukup banyak kita membicarakan tentang konflik, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas konflik secara konseptual. Perkembangan teori konflik sendiri tidak terlepas sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural, walaupun secara mendasar teori konflik tidak memisahkan dirinya dari akar struktur fungsionalnya.²² Keberatan utama dari teoritikus konflik adalah cara pandang fungsionalisme struktural dalam melihat konflik yang dianggap sebagai patologis dalam masyarakat, sementara menurut penganut teori konflik melihat bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki unsur-unsur konflik selain unsur integrasi. Perkembangan teori konflik sendiri tak bisa dilepaskan dari

²⁰ I. Abdullah, *Berpihak Pada Manusia, Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru*. (Yogyakarta: TICI Publications dan Pustaka Pelajar, 2010)

²¹ Isjoni, *Orang Melayu di Zaman yang Berubah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

²² Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana, 2007)

karya-karya pemikir-pemikir hebat seperti Marx, Weber dan Simmel.²³ Dahrendorf adalah salah satu tokoh utama teori ini, kritik awalnya adalah mengenai sistem sosial dipersatukan oleh kerjasama sukarela, tetapi menurut teoritis konflik masyarakat disatukan oleh paksaan dan ketidakbebasan. Dahrendorf selanjutnya berpandangan bahwa distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.²⁴

Menurut Dahrendorf, otoritas tidak terletak pada orang atau individu, melainkan ia melekat pada posisi, sementara itu berbagai posisi dalam masyarakat menempati kualitas otoritas yang berbeda-beda. Otoritas sendiri suatu asosiasi bersifat dikotomis, yakni ada kelompok yang menempati posisi otoritas dan kelompok lainnya menempati posisi subordinat. Otoritas sendiri tidak konstan keberadaannya, ada orang yang pada suatu asosiasi menempati posisi otoritas (dominan) namun pada asosiasi lainnya dia menempati posisi subordinat, dan kecenderungan pada orang yang menempati posisi otoritas adalah mempertahankan status quo, sedangkan orang yang berada pada posisi subordinat akan selalu melakukan perubahan. Konflik kepentingan akan senantiasa terjadi walaupun sifatnya masih bersifat laten, yang artinya posisi otoritas atau kelompok dominan senantiasa dalam ancaman dari kelompok yang berada pada posisi subordinat. Terdapat tiga tipe kelompok yakni (i) kelompok semu, kelompok yang memiliki kepentingan sama; (ii) kelompok kepentingan, merupakan agen riil dari konflik kelompok dan memiliki struktur dan yang (iii) kelompok konflik atau kelompok yang terlibat secara actual dalam konflik kelompok. Selain itu, konflik juga memiliki peran dalam mempertahankan kekuasaan, namun konflik juga suatu jalan untuk melakukan perubahan dan perkembangan.²⁵

Selain Dahrendorf, tokoh teori konflik lainnya adalah Randal Collins, Collins sendiri lebih memfokuskan perhatiannya pada efek-efek dari stratifikasi sosial pada tingkatan mikro, karena stratifikasi sosial merupakan institusi yang banyak menyentuh ciri kehidupan seperti “kekayaan, politik, karier, keluarga, klub, komunitas, gaya hidup”.²⁶ Terdapat tiga pendekatan konflik menurut Collins, yakni (i) manusia hidup dalam dunia subyektif; (ii) manusia lebih dari sekedar aktor individual dan (iii) manusia selalu berusaha untuk mengontrol pengalaman aktor. Sehingga karena ketiga pendekatan tersebut berakibat terjadinya konflik individu. Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, Collins kemudian mengembangkan lima prinsip analisis yakni (i) teori konflik harus memusatkan pada kehidupan nyata; (ii) teori konflik stratifikasi harus meneliti secara cermat susunan material yang berpengaruh terhadap interaksi; (iii) dalam kondisi timpang, kelompok yang memiliki sumberdaya akan mengeksploitasi kelompok yang sumberdayanya terbatas; (iv) melihat fenomena kultural dari sudut pandang kepentingan, sumberdaya dan kuasa, serta yang ke (v) komitmen tegas terhadap dunia empiris. Di samping itu, Collins juga melihat bahwa suatu organisasi adalah arena untuk bersaing.²⁷

Secara umum, teori konflik memiliki penekanan pada dinamika internal masyarakat, distribusi akses sumberdaya, pertentangan kepentingan dan kelas, kemampuan kelompok

²³Haryanto, *Spekturm Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016)

²⁴Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana, 2007)

²⁵Ibid. hlm. 154-157

²⁶Ibid. hlm. 161

²⁷Ibid. dan S. Haryanto, *Spekturm Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016)

dominan mempertahankan dominasi dan peluang dari kelompok subordinat dalam melakukan suatu perubahan dalam masyarakat.²⁸ Pada bagian selanjutnya kita akan membicarakan resolusi konflik.

2. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik dengan cara mengeleminir alasan-alasan substantif maupun emosional yang menyebabkan terjadinya konflik.²⁹ Resolusi juga merupakan bentuk pengelolaan konflik yang lebih dari sekadar penyelesaian konflik.³⁰ Konflik sendiri tidak perlu dihilangkan namun harus dikelola secara baik dan ditangani secara konstruktif sehingga melahirkan suatu bentuk kooperatif dalam pengelolaan perbedaan kepentingan. Negosiasi sendiri merupakan salah satu cara atau teknik dalam menyelesaikan konflik dalam suatu Negara yang demokratis, teknik negosiasi sendiri sangat bergantung terhadap kemampuan negosiator atau representasi kelompok yang sedang bertikai dalam menengahkan kepentingan-kepentingan yang diusungnya. Dalam konteks konflik-konflik sosial, pendekatan hukum seringkali tidak mampu memenuhi rasa keadilan kelompok-kelompok yang sedang bertikai, sehingga penyelesaian secara kultural diharapkan lebih mampu dalam menanganinya dan ketokohan pemimpin informal biasanya memiliki peran yang lebih baik.

Resolusi konflik sendiri baik dalam ranah internal kelompok maupun dengan kelompok luar tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak dilakukan suatu mediasi. Namun seringkali yang menjadi masalah dalam suatu mediasi adalah terdapat perbedaan power yang tidak setara diantara representasi (negosiator) kelompok, sehingga penyelesaian konflik tidak berjalan dengan baik dan tuntas.³¹ Kelompok yang memiliki power lebih besar tentu akan lebih sulit mengalah karena lebih leluasa dalam menegosiasikan kepentingan-kepentingan kelompoknya. Untuk itu keseimbangan power diantara representasi menjadi sangat penting agar terdapat pertukaran yang setara tanpa ada orang atau kelompok yang dirugikan dan semua pihak merasakan dari nilai-nilai kesepakatan. Agar terjadi keseimbangan power diantara representasi (negosiator) kelompok tersebut, maka dibutuhkan suatu mediator yang memiliki power lebih besar atau juga seseorang yang memiliki ketokohan yang kuat sehingga bisa memediasi kelompok-kelompok yang bertikai tersebut. Tetapi tidak jarang pula representasi kelompok memainkan strategi untuk menguntungkan kelompok yang diwakilinya.

Lussier dalam Alwi (2013) menjelaskan gaya manajemen konflik yang terdiri dari lima hal penting dalam mengelola suatu konflik dari gaya yang paling moderat hingga yang paling ekstrim. Kelima gaya tersebut antara lain *accommodating*, *collaborating*, *compromising*, dan *forcing* atau *competings*serta gaya yang terakhir *avoiding*. Untuk gaya yang pertama yakni *accommodating* atau akomodasi merupakan bentuk yang paling moderat,

²⁸S. Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016), hlm. 46

²⁹S. Alwi, *Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2013), hlm. 18

³⁰Muryanti dkk., *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana dan Laboratorium Sosiologi UIN Sunan Kalijaga . 2013)

³¹S. Alwi, *Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2013)

dimana kebutuhan pihak lain diperhatikan dan cenderung mengabaikan perbedaan demi hubungan yang harmonis. Yang kedua kompromi juga termasuk moderat karena mencari keseimbangan diantara dua pihak. Ketiga *collaborating* memiliki orientasi kerja sama sehingga lebih moderat agar mendapatkan keuntungan bersama. Gaya yang keempat, gaya *forcing* atau *competing* termasuk gaya yang kurang kooperatif karena tidak mempertimbangkan kebutuhan kelompok lain. Sedangkan yang paling ekstrim adalah *avoiding*, dimana tidak memiliki perhatian terhadap konflik yang terjadi. Dari kelima gaya tersebut, yang paling moderat yakni akomodasi (*accommodating*) dan yang paling ekstrim *avoiding* akan selalu melahirkan suatu resolusi yang tidak menguntungkan kedua-duanya³².

3. Teori Reproduksi Kebudayaan

Ketiga karakter ketegangan yang mungkin terjadi yakni dinamika internal Melayu, menguatnya otoritas Negara dan globalisasi tersebut membutuhkan respons tertentu dalam suatu masyarakat. Selain respons teknis, ekonomi, dan politik, terdapat pula respons kebudayaan mengingat kebudayaan merupakan pedoman hidup masyarakat.³³ Kebudayaan memiliki kekuatan-kekuatan baik berupa sistem gagasan, sistem nilai maupun sistem praktik yang mampu dioperasionalkan oleh masyarakat untuk merespons berbagai bentuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kekuatan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat menjadi modal yang sangat penting dalam merespon tantangan-tantangan yang silih datang. Kebudayaan sendiri bersifat dinamis dan tidak berjalan linear, sehingga setiap konteks tantangan yang hadir secara praktis dapat dinegosiasikan dengan tanpa mengurangi substansi dari kebudayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Pengalaman kolektif pada masa lalu, dapat dialih bentuk dalam menyelesaikan dan memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya.

Menegaskan sekali lagi, bahwa studi ini sangat penting artinya dalam memahami kebudayaan Melayu secara utuh, mengutip dari tulisan Irwan Abdullah (2015),

“...memahami kebudayaan harus dimulai dengan mendefinisikan ulang kebudayaan itu sendiri, bukan sebagai kebudayaan generik (yang merupakan pedoman yang diturunkan), tetapi sebagai kebudayaan diferensial (yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial). Kebudayaan bukanlah suatu warisan yang secara turun temurun dibagi bersama atau dipraktikkan secara kolektif, tetapi menjadi kebudayaan yang lebih bersifat situasional yang keberadaannya tergantung pada karakter kekuasaan dan hubungan-hubungan yang berubah dari waktu ke waktu...”³⁴

Dari kutipan tersebut jelas terpapar bahwa, untuk memahami suatu kebudayaan kita sebagai pelaku budaya dituntut untuk tidak hanya menerima warisan semata, lebih jauh lagi masyarakat Melayu harus senantiasa harus mampu mendefinisikan kebudayaannya dalam menghadapi sejumlah tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi sehari-hari. Jika membicarakan reproduksi kebudayaan, maka kita akan membicarakan dua hal yakni, membicarakan tentang kearifan budaya dan pelestarian budaya.³⁵

³² Ibid.

³³ C. Gertz, *Tafsir Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

³⁴ I. Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 10

³⁵ Ibid.

Politik Kebudayaan

Adanya pilihan-pilihan berupa nilai-nilai baru yang ditawarkan oleh globalisasi beserta kuatnya tekanan dari otoritas Negara menjadikan suatu keharusan lahirnya kontetasi-kontestasi yang mendorong masyarakat Melayu untuk berstrategi. Duija (2005) menyebutkan bahwa:

“...suatu politik kebudayaan pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek tujuan, atau penjelmaan nilai yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan itu. Kebudayaan berarti bentuk penjelmaan hidup dan kelakuan manusia. Kebudayaan merupakan proses manusia mencoba mengerti, menaklukkan, dan mengatur kembali alam yang serba berubah ini....Politik kebudayaan berada pada transformasi budaya secara spiral sehingga dunia tradisi terus berputar mengikuti modernisasi...”³⁶

Paparan di atas memperlihatkan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem yang difungsikan oleh masyarakat dalam menaklukkan dan mengatur kembali kehidupan yang dinamis dan berubah. Sementara itu, pengertian luas dari politik kebudayaan menurut Jordan dan Weedon (1995)³⁷ yakni kekuasaan untuk: (1) memberi nama; (2) mempresentasi akal sehat; (3) menciptakan “versi-versi resmi”; serta (4) mempresentasi dunia akal sehat. Kebudayaan sendiri dapat dimaknai sebagai ruang kontestasi makna dalam memperebutkan klaim dan dominasi atas kebenaran.

Kerangka Model Strategi Kultural

Reproduksi kebudayaan menyangkut dua hal yang dibicarakan sebelumnya, yakni kearifan dan pelestarian, maka kita membutuhkan suatu kerangka model strategi kultural yang diharapkan dapat dijadikan sebagai model kultural Melayu dalam menghadapi tantangan global. Adapun langkah-langkah dalam model ini dimulai dari langkah pertama identifikasi, yakni bagaimana budaya melayu dapat membaca dan atau menginterpretasikan persoalan-persoalan menyangkut konflik dan sengketa yang dihadapi oleh masyarakat Melayu perkotaan khususnya di kota Palembang. Langkah kedua adalah validasi, yakni bagaimana budaya Melayu mampu memberikan penilaian atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Melayu. Langkah ketiga strategi kultural, untuk melihat bagaimana budaya Melayu mampu merumuskan tindakan-tindakan dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam masyarakat Melayu. Selanjutnya langkah keempat konsolidasi, yakni bagaimana budaya Melayu mampu mengembangkan pranta-pranata dan institusi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Melayu, serta langkah kelima rekonstruksi, untuk mematerialisasikan budaya Melayu dalam pemecahan persoalan yang dihadapi masyarakat Melayu khususnya di kota Palembang.

³⁶ I.N. Duija, Tradisi Lisan, Naskah dan Sejarah, Sebuah Catatan Politik Kebudayaan. Jurnal *Wacana*, Volume 7, No. 2. 2005

³⁷ Ibid. sebelumnya Duija mengutip dari barker (2005).

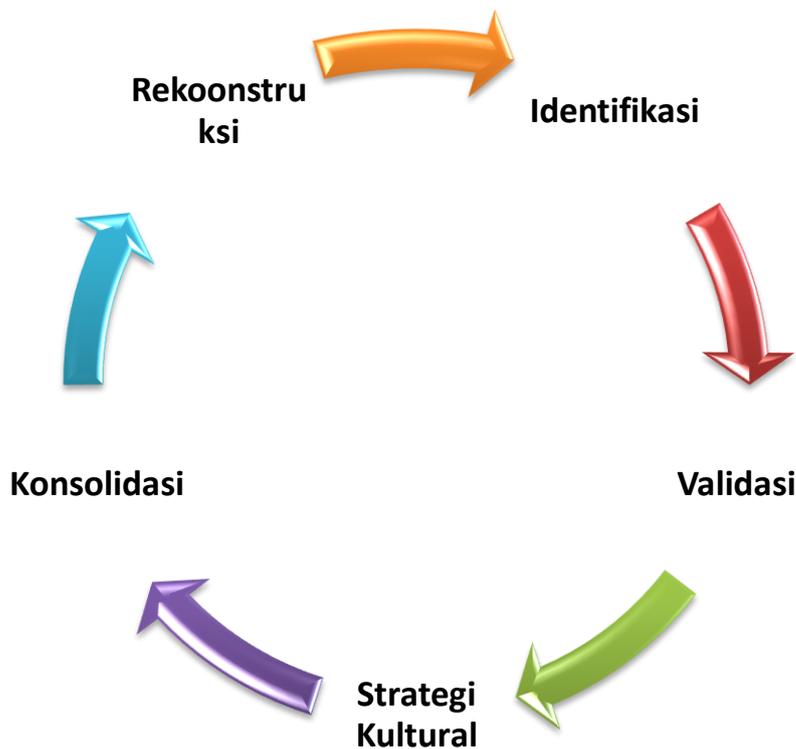


Diagram 1. Model

Strategi Kultural

Dalam diagram dapat dilihat bagaimana strategi kultural yang dimiliki masyarakat Melayu digambarkan dalam bentuk siklus. Diawali dengan langkah identifikasi hingga pada tingkatan rekonstruksi budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Melayu dalam merespon sejumlah tantangan baik dari dinamika internal, Negara dan pasar (globalisasi) sehingga masyarakat Melayu memiliki strategi kultural dalam pemecahan persoalan yaitu yang menyangkut konflik dan sengketa yang dihadapi dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Selain itu, dalam perspektif aplikasi teori, khususnya untuk mengetahui sejauhmana interaksi sosial antar etnis di Palembang dipakai teori Talcott Parson³⁸ dan pengikutnya tentang *struktural fungsional*.³⁹ Kemudian berkaitan dengan konsep tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dalam suatu kelompok masyarakat. Tradisi bukan suatu hal yang tertulis dan terjadi (ada) melalui proses kesepakatan, namun tradisi ada seakan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun, menurut pengalaman dan kepercayaannya.

³⁸Talcott Parson mengungkapkan ada dua macam mekanisme sosial yang sangat penting yang mana hasrat-hasrat para anggota dapat dikendalikan pada tingkat dan arah yang menuju terpeliharanya kontinuitas system sosial, yakni mekanisme sosialisasi dan pengawasan sosial (*social control*). Lihat: J.Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13

³⁹Lihat: Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. (Bina Aksara, 1989), hlm.132

Sementara itu, untuk mengkaji proses asimilasi dan enkulturasi budaya digunakan pendekatan Koentjaraningrat. Koentjaraningrat⁴⁰ mengatakan bahwa asimilasi terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, adanya kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. *Kedua*, individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama. *Ketiga*, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Merujuk pada sosiolog Amerika Milton Gordon--nama yang paling sering dirujuk dalam setiap diskusi tentang asimilasi budaya--merinci konsep asimilasi sebagai proses sosial yang multi tingkatan (*multi-stages of assimilation*) yang menyangkut baik kelompok mayoritas maupun minoritas sebagai berikut: (i) asimilasi kebudayaan (atau akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas; (ii) asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas; (iii) asimilasi perkawinan yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran; (iv) asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa kebangsaan berdasarkan mayoritas; (v) asimilasi penerimaan sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka dari kelompok mayoritas; (vi) asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi; dan (vii) asimilasi kewarganegaraan yang berkaitan dengan tak adanya perbenturan, bentrokan atau konflik mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan dengan kelompok mayoritas.⁴¹

Teori asimilasi budaya Gordon, yang dalam banyak hal lebih sering pula disebut akulturasi (*acculturation*) ini turut menuai perdebatan. Akulturasi merupakan sub-proses dari asimilasi dan mengindikasikan adanya pergantian ciri-ciri budaya masyarakat minoritas dengan ciri-ciri budaya masyarakat asli. Namun, akulturasi juga menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok minoritas boleh jadi tetap memiliki sebagian ciri asli mereka, serta membuang ciri-ciri lainnya. Kemudian mereka juga mungkin menerima sebagian ciri budaya mayoritas dan menolak ciri-ciri lainnya.⁴²

F. Metodologi Penelitian

1. Metode

Penelitian disertasi ini akan menggunakan metode kualitatif, penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat memahami subyek penelitian secara utuh dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya sekedar mencari data empiris yang dialami atau sekedar data yang teramati, namun juga ingin menggali makna-makna subyektif yang melandasi perilaku dan simbol yang berlaku dalam masyarakatnya. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai berisi panduan wawancara dan sejumlah daftar

⁴⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Baru, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 255-256

⁴¹Lihat: P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 15

⁴²Poerwanti Hadi Pratiwi, *Asimilasi dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep*. Dalam situs <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/poerwanti-hadi-pratiwi-spd-msi/asimilasi-akulturasi.pdf>, diunduh pada 29 Desember 2017

pertanyaan terbuka yang disusun sebelumnya tapi dengan tidak menutup kemungkinan pertanyaan baru pada saat wawancara berlangsung.

Penelitian disertasi dengan metode kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan datanya melalui : (1) Observasi, observasi dilakukan untuk mengamati keberadaan budaya di Kota Palembang tentang keberadaan ruang dan kelembagaan budaya. Pada saat yang sama akan dilakukan pengamatan terlibat untuk kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan; (2) Wawancara, Wawancara secara mendalam pada tokoh-tokoh budaya yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan kehidupan masyarakat Melayu di Kota Palembang; (3) studi pustaka, studi pustaka dilakukan dengan mencari data-data sekunder dari berbagai literature, data statistik, laporan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta (4) *focus group discussion* (FGD), melaksanakan FGD dengan melibatkan kelompok terkait dengan isu penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dipilihnya kota Palembang sebagai lokasi penelitian karena mempertimbangkan bahwa Kota Palembang merupakan kota global yang maju dan juga merupakan tempat bermukimnya kaum Melayu Urban yang di kota tersebut masyarakat dan tradisi Melayu masih menjadi budaya dominan. Di samping itu, atas pertimbangan historis bahwa kota Palembang merupakan pusat dari Kerajaan Melayu yang besar yakni Sriwijaya serta Kesultanan Palembang.

3. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam enam bab, yakni diawali dengan Bab I Pendahuluan, selanjutnya Bab II yang menceritakan tentang dinamika sosial budaya masyarakat Melayu Palembang, baik berkaitan dengan identitas kemelayuan Palembang, relasi antar etnis, sistem sosial kemasyarakatan serta budaya dan pemeliharaan tradisi. Sedangkan Bab III membahas peta konflik dalam masyarakat Melayu Palembang, meliputi pembahasan konflik internal etnis dalam masyarakat Melayu Palembang, disharmoni hubungan Arab Hadrami dengan Kesultanan Palembang, dan konflik etnis Cina dalam masyarakat Melayu Palembang.

Pada Bab IV dibahas kearifan Melayu dalam relasi konflik, meliputi tradisi Isla sebagai *melting pot* Melayu Palembang, kearifan Melayu dalam resolusi konflik, dan simulasi dan komodasi. Kemudian pada Bab V memuat kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa pada intinya dalam menyelesaikan konflik masyarakat Melayu Palembang lebih banyak diselesaikan melalui musyawarah. Hal ini karena masyarakat Melayu Palembang lebih mengedepankan perdamaian sesuai dengan ajaran Islam yang telah menjadi landasan nilai dalam kehidupan. Dengan slogan Melayu identik dengan Islam dan Islam identik dengan Melayu. Jadi Melayu dan Islam merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam masyarakat Melayu Palembang saat ini telah terjadi kecenderungan penguatan identitas kemelayuan. Misalnya, dapat diidentifikasi dari fakta yang ada di lapangan, di maa

masyarakat Melayu Palembang cenderung mengidentifikasikan dirinya sebagai pewaris sah kejayaan kesultanan Melayu di masa lalu. Di Palembang salah satu organisasi yang aktif memperkuat identitas kemelayuan di kawasan Sumatera adalah Kerukunan Keluarga Palembang yang merupakan keturunan sultan. Mereka ingin membangkitkan kembali ikon-ikon identitas kemelayuan di Palembang dengan cara melantik sultan, mengadakan festival budaya Palembang dan seni kemelayuan Nusantara. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa identitas kemelayuan di daerah tersebut masih ada hingga kini.

Dalam perspektif sejarah, Palembang pernah dikenal sebagai “ibukota tidak resmi ekonomi” sebab posisinya sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan bisnis. Karena posisinya yang strategis, Palembang yang secara sosio-kultural masyarakatnya mengidentifikasikan diri sebagai rumpun etnis Melayu, seperti diakui oleh Russel.

Berkaitan dengan konflik pendatang, khususnya etnis Cina dan Arab Hadrami dengan penduduk pribumi Palembang, sejauh ini masih dalam batas-batas yang wajar. Dalam sejarah, misalnya, konflik Arab Hadrami dengan kesultanan Palembang pernah terjadi. Demikian pula konflik antara etnis Cina dengan pribumi Palembang juga pernah terjadi pada medio Mei 1998. Peristiwa medio Mei 1998 bukan hanya terjadi di Palembang, tetapi hampir di seluruh tanah. Konflik yang terjadi antara etnis Cina dan Arab Hadrami sejauh ini lebih banyak disebabkan oleh politik dan ekonomi, bukan akibat proses sosial-budaya.

Relasi pendatang dengan penduduk pribumi Palembang kalau dilihat dari pandangan teori asimilasi telah terjalin dengan harmonis. Meskipun akibat politik segregasi di zaman penjajah Belanda di mana pemukiman masyarakat Cina Palembang dapat kita lihat jejak sejarahnya terdapat di wilayah 7 Ulu yang secara administratif, termasuk wilayah Kelurahan 7 Ulu, kecamatan Seberang Ulu I, Palembang disebut “Kampung Kapitan”. Sedangkan etnis Arab Hadrami berdomisili di kampung 7 Ulu kepala keluarga besar ada Klan Barakah, kampung 10 Ulu Klan Alkaf, kampung 13 Ulu Klan al-Munawar, kampung 14 Ulu Klan al-Mesawa, kampung 16 Ulu Klan Assegaf, dan kampung 15 Ulu Klan Aljufri. Sementara di daerah seberang Ilir, kepala keluarga besarnya di kampung 8 Ilir adalah Klan Alhabsyi dan Klan Alkaf. Klan-klan ini kemudian disebut “Kampung Arab”

Dalam masyarakat Melayu Palembang telah terjadi kesadaran stratifikasi sosial. Sejak masa kesultanan Palembang bahwa orang Palembang asli telah memiliki kesadaran kelas, akibat pengaruh budaya Jawa yang disesuaikan budaya lokal Palembang. Kesadaran kelas tersebut dengan jelas dapat dilihat dalam identitas pemakaian gelar di kalangan lingkungan kraton. Berbeda dengan bahasa *Palembang Alus*, identitas pemakaian gelar masih tetap hidup dalam kalangan masyarakat Palembang. Identitas gelar tidak saja berlaku sebagai pembeda antara kelas bangsawan, priyayi, dengan kelas rakyat, namun juga di kalangan priyayi itu sendiri. Elite tradisional yang masih terdapat di Palembang membentuk masyarakat dengan stratifikasi sosial yang didasarkan atas tingkat kebangsawannya, seperti Raden, Masagus, Kiagus, dan Kemas untuk bangsawan laki-laki. Sedangkan untuk gelar kebangsawanan wanita, yaitu, Raden Ayu, Masayu, Nyiyayu, dan Nyimas. Di samping itu terdapat kelas rakyat jelata yang sering memakai sebutan Si.

Dalam perspektif teori asimilasi, masyarakat Melayu Palembang merupakan masyarakat yang terbuka terhadap setiap kelompok yang berbeda. Keterbukaan ini tidak hanya terjadi saat ini, tetapi juga sejak zaman kerajaan Sriwijaya, masa kesultanan

Palembang hingga saat ini. Salah satu contoh asimilasi dan akulturasi budaya pernikahan adalah legenda Pulau Kemaro, arsitektur Masjid Agung Palembang, Masjid Cheng Ho, dalam perspektif antropo-religius, akulturasi nilai-nilai keislaman dalam tradisi dan budaya masyarakat Palembang tidak terlepas dari latar historis terkait dengan kedatangan dan proses penyebarannya ajaran Islam dalam masyarakat Palembang. Di sinilah salah satu peran yang dimainkan oleh para ulama, termasuk lembaga pendidikan Islam, dalam masyarakat Melayu Palembang sebagai *broker culture*.

Proses asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat Melayu Palembang sudah mengarah pada akomodasi kebudayaan. Dalam hal pakaian, misalnya, tidak sedikit masyarakat non Arab, telah memakai pakaian ciri khas Arab Hadrami, yakni pakaian gamis. Demikian pula dalam hal makanan, ada nasi kebuli (nasi minyak yang ada kaldu kambingnya) disajikan pada waktu pernikahan maupun makanan pempek atau empek-empek.